



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

**KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

T E N T A N G

**PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
DI DAERAH TAHUN ANGGARAN 1994/1995 DISAMPAIKAN DALAM RAPAT
PARIPURNA ISTIMEWA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN**

LAMONGAN, 24 MEI 1995

I. PENDAHULUAN

Pertama-tama marilah kita memanjatkan rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu Wata'ala. yang atas karunia dan limpahan Rahmat-Nya kita pada hari ini dapat menghadiri Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah di hadapan Rapat Paripurna Istimewa Dewan merupakan kewajiban Kepala Daerah yang mekanismenya telah diatur pada Pasal 22 ayat 3 UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang "Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah".

Keterangan Pertanggungjawaban ini sengaja disampaikan secara garis besar, sedangkan penjelasan secara rinci dimuat dalam 3 (tiga) buah buku yang merupakan lampiran tak terpisahkan dari naskah Keterangan Pertanggungjawaban ini.

Selanjutnya penyampaian keterangan Pertanggungjawaban ini sengaja dilakukan secara rutin setiap tahun tepat dengan peringatan Hari Jadi Kabupaten Lamongan, dan pada kali ini adalah Hari Jadi yang Ke 426. Rangkaian kegiatan ini memiliki arti yang penting dan strategis bagi segenap Aparat Pemerintah dan segenap lapisan masyarakat di Kabupaten Lamongan, yang antara lain :

1. Dengan suasana Peringatan Hari Jadi semacam ini dimaksudkan sebagai langkah pendinginan mesin ekonomi yang telah kita laksanakan dalam satu tahun anggaran yang baru saja kita lewati. Dalam suasana semacam ini kita mampu menenangkan pikiran, mengendorkan urat syaraf sehingga mampu berpikir secara jernih untuk merefleksi dan mawas diri tentang kekurangan-kekurangan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan di masa lampau dan sekaligus mampu menyusun kebijaksanaan secara arif dan bijaksana guna melanjutkan perjuangan dan pengabdian kita dalam pembangunan di masa datang.
2. Saat ini kita baru saja melewati tahun pertama Pelita VI dan mulai memasuki pintu gerbang Tahun Kedua Pelita VI, oleh karena itu peringatan Hari Jadi Kabupaten Lamongan yang Ke 426 ini sengaja dilakukan lebih sederhana mengingat efisiensi biaya dan seluruh kegiatannya nanti akan kami jadikan satu pada tanggal 17 Agustus 1995 yang lebih spesifik sekaligus menyongsong Peringatan 50 Tahun Indonesia Merdeka dengan melibatkan segenap aparatur dan seluruh lapisan masyarakat sampai di pelosok pedesaan. Keterlibatan seluruh aparat dan masyarakat ini dimaksudkan agar menumbuhkan suasana baru yang lebih menyegarkan dan menggairahkan serta optimistis dalam kesiapan untuk menyongsong pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahun Kedua.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Proses pembangunan yang kita laksanakan selama ini telah menunjukkan prestasi yang menggembirakan dalam berbagai aspek kehidupan. Keberhasilan itu ditandai oleh berbagai prestasi Kabupaten Lamongan di Tingkat Nasional dan Regional, dalam berbagai bidang pembangunan, bahkan pernah mendapatkan penghargaan pada Tingkat Internasional.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan yang terus meningkat telah mencapai rata-rata sebesar 7 Persen per tahun dan melebihi target Pelita V Jawa Timur sebesar 6,2 persen merupakan salah satu indikator keberhasilan kita. Oleh karena itu, tidak mengherankan kalau Kabupaten Lamongan selalu menjadi sasaran studi banding bagi daerah-daerah lainnya, keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa kemampuan aparatur kita semakin meningkat dan didukung oleh peran serta masyarakat yang terus berkembang.

Kondisi masyarakat Kabupaten Lamongan yang kondusif, merupakan prasyarat bagi keberhasilan kita. Keberhasilan itu juga menunjukkan bahwa Panca Tertib dan Koordinasi telah dilaksanakan dengan mantap.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Sekarang perkenankanlah saya menyampaikan penjelasan mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah Tahun Anggaran 1994/1995.

II. ARAH PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN TAHUN 1994/1995

Penyelenggaraan pemerintahan diarahkan untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Agar Aparatur dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka mutlak diperlukan peningkatan kemampuan dan profesionalisme Aparatur, baik secara teknik maupun secara manajerial. Disamping itu penanaman disiplin, sikap mental dan dedikasi perlu ditingkatkan. Untuk itu program peningkatan mutu aparatur dilaksanakan dengan baik; melalui pendidikan, kursus-kursus dan latihan-latihan.

Peningkatan pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu agar masyarakat benar-benar semakin menikmati hasil-hasil pembangunan dan untuk lebih menggairahkan peran serta mereka dalam pembangunan. Disamping itu tugas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat ini memiliki peranan sentral dalam rangka men-

dorong tumbuh dan berkembangnya sektor swasta terutama dalam rangka mempertahankan kepentingan mereka terhadap persaingan yang semakin kompetitif, karena pengaruh era informasi dan globalisasi, sehingga peran serta masyarakat dalam pembangunan diharapkan semakin besar. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan dan Repelita VI Daerah, pembangunan daerah pada dasarnya merupakan sub sistem dari pembangunan nasional. Karena itu, pembangunan daerah harus mendukung dan menyatu dengan pembangunan nasional, sehingga strategi pembangunan daerah harus berorientasi kepada pembangunan nasional.

Konsisten dengan tujuan pembangunan nasional, maka tujuan pembangunan daerah diharapkan untuk mencapai peningkatan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan seluruh rakyat yang semakin merata dan adil, sesuai dengan Trilogi Pembangunan.

Sesuai dengan tujuan tersebut, strategi penggunaan anggaran belanja diarahkan dengan memberikan prioritas yang sangat tinggi pada program-program pemerataan antar daerah, perluasan pelayanan dasar masyarakat, pengembangan sumber daya manusia dan penanggulangan kemiskinan.

Guna mencapai hasil yang optimal, pelaksanaan program pembangunan disamping melaksanakan penajaman prioritas, aspek

keterpaduan antar sektor, sub sektor maupun program sangat diperlukan.

Berdasarkan Repelita VI Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Program Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ditetapkan 9 (sembilan) aspek pembangunan yang mempunyai kedudukan yang strategis sebagai program utama yaitu :

1. Pertumbuhan perkembangan yang seimbang.

Pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan 7 persen per tahun dapat mampu meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor pertanian, industri, perdagangan dan sektor-sektor lain yang sekaligus diharapkan mampu memberikan sumbangan yang berimbang terhadap PDRB.

2. Pembangunan kependudukan dan sumberdaya manusia.

Usaha-usaha untuk menekan jumlah penduduk terus ditingkatkan sekaligus dengan peningkatan kualitas kesejahteraan penduduk. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia harus ditunjang dengan pembangunan kesehatan yang diusahakan untuk peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan masyarakat.

3. Lapangan kerja

Ketidak seimbangan antara pencari kerja dan lapangan kerja yang ada perlu segera diatasi dan dipecahkan dengan membuka lapangan kerja baru dari berbagai usaha.

4. Lingkungan hidup dan tata ruang.

Dalam pembangunan yang berkelanjutan harus berwawasan lingkungan, dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan pola tata ruang, tataguna tanah dan tataguna air serta tata kesatuan yang harmonis dan dikelola secara terpadu.

5. Pemerataan hasil-hasil pembangunan dan pemberantasan kemiskinan.

Pembangunan Daerah diarahkan untuk memperkuat otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab, dan untuk menyerasikan tingkat kemajuan antar wilayah dengan mempercepat pengembangan wilayah yang masih tergolong tertinggal.

6. Pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dan manajemen pembangunan yang makin efisien dan efektif.

Dimaksudkan agar hasil-hasil pembangunan agar tetap berfungsi selama mungkin sehingga dapat berfungsi sebagai landasan pembangunan pada masa yang akan datang.

7. Pembinaan dan pengembangan model-model pembangunan.

Dalam rangka mempercepat tercapainya sasaran pembangunan yang berkelanjutan perlu diteliti, dikaji, dievaluasi dan dimantapkan model-model pembangunan yang sudah ada serta perlu dikembangkan alternatif lain.

8. Pembinaan stabilitas daerah yang dinamis.

Agar pembangunan daerah dapat berjalan dengan lancar dan baik harus didukung dengan Stabilitas Nasional dan Daerah yang mantap dan dinamis.

Dalam kaitan ini stabilitas politik, ekonomi, dan keamanan diarahkan agar tetap mantap dan berkelanjutan serta terkendali.

9. Peningkatan otonomi daerah.

Tercapainya pembangunan keseluruhan wilayah harus dibarengi dengan peningkatan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung-jawab agar unsur-unsur penguat dalam otonomi itu mampu mendorong kemajuan pembangunan di daerah sendiri secara mandiri.

Program Pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 1994/1995 tetap bertumpu pada Trilogi Pembangunan dan mengacu pada Pokok perhatian dari Pelita VI Jawa Timur, yang meliputi :

1. Tahap mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
2. Pengentasan Kemiskinan
3. Pembinaan kehidupan umat beragama.

Melalui pemilihan prioritas yang tajam dan konsistensi program serta pelaksanaan pengendalian secara ketat, maka program-program pembangunan dapat mencapai sasaran secara efektif dan efisien.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan APBD tahun 1994/1995.

III. PELAKSANAAN APBD TAHUN 1994/1995

Pelaksanaan APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1994/1995 secara teknis mengikuti petunjuk sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD. Perihal Pedoman Penyusunan APBD 1994/1995

APBD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1994/1995 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1994 dan Perda PAK Nomor 15 Tahun 1994, yang telah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan surat Keputusan tanggal 15 Juni 1994 dan diundangkan dalam Lembar Daerah tanggal 1 Juli 1994 seri C Nomor 4C

Besarnya APBD tahun 1994/1995 setelah ada perubahan adalah 54 milyar 185 juta 977 ribu 900 rupiah, terdiri dari :

- APBD Murni sebesar 33 milyar 438 juta 353 ribu 300 rupiah, dan
- Urusan Kas dan Perhitungan sebesar 20 milyar 747 juta 624 ribu 600 rupiah.

Adapun realisasi APBD tahun 1994/1995 baik sisi pendapatan maupun sisi belanja dapat dijelaskan dengan perangkaan sebagai berikut :

1. Sisi Pendapatan Daerah, dari target sebesar 33 milyar 438 juta 353 ribu 300 rupiah, realisasinya mencapai 34 milyar 2 juta 479 ribu 119 rupiah, 01 sen, sehingga terdapat selisih lebih sebesar 564 juta 125 ribu 819 rupiah 01 sen atau mencapai 101,69 persen dari target.
2. Khusus mengenai Pendapatan Asli Daerah, target yang direncanakan sebesar 3 milyar 260 juta 970 ribu rupiah realisasinya

mencapai sebesar 3 milyar 324 juta 900 ribu 891 rupiah, 49 sen sehingga terdapat selisih lebih sebesar 63 juta 930 ribu 891 rupiah, 49 sen atau sebesar 101,96 persen dari target.

3. Pada sisi Belanja, dari rencana plafon sebesar 33 milyar 438 juta 353 ribu 300 rupiah, realisasinya mencapai 33 milyar 415 juta 052 ribu 464 rupiah 73 sen, yang terdiri atas :
 - Belanja Rutin sebesar 12 milyar 960 juta 616 ribu 745 rupiah, 69 sen;
 - Belanja Pembangunan sebesar 20 milyar 454 juta 435 ribu 719 rupiah, 04 sen.

Dengan demikian terdapat sisa lebih perhitungan APBD tahun 1994/1995 yaitu sebesar 587 juta 426 ribu 645 rupiah 28 sen.

Sementara itu berkaitan dengan bagian Urusan Kas dan Perhitungan dapat dijelaskan bahwa pada sisi penerimaan direncanakan sebesar 20 milyar 747 juta 624 ribu 600 rupiah telah direalisasi 21 milyar 481 juta 041 ribu 835 rupiah 90 sen, sedangkan pada sisi pengeluaran yang direncanakan dari plafond 20 milyar 747 juta 624 ribu 600 rupiah, telah direalisasi sebesar 21 milyar 455 juta 269 ribu 605 rupiah 77 sen.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan atas pelaksanaan APBD tahun 1994/1995 seperti berikut:

1. Pengelolaan APBD 1994/1995 telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku;
2. Perhitungan APBD 1994/1995 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 587 juta 426 ribu 654 rupiah 28 sen;
3. Dengan demikian pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Tahun Anggaran 1994/1995 telah terlaksana secara berimbang antara pendapatan dan belanjanya serta dinamis dalam arti ada peningkatan dalam setiap tahunnya.

Demikian informasi perangkaan realisasi APBD 1994/1995.

Berikut ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan.

IV. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Peran serta masyarakat yang makin besar dalam pelaksanaan pembangunan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di

daerah semakin mantap dan mendapat dukungan penuh dari masyarakat, apabila pada tahun 1993/1994 swadaya murni masyarakat mencapai nilai 8 milyar 760 juta 292 ribu rupiah, maka pada tahun 1994/1995 mencapai 9 milyar 136 juta 50 ribu rupiah atau naik sebesar 4,29 persen.

Kemajuan penyelenggaraan pemerintahan di daerah disebabkan karena peningkatan manajemen Pemerintahan Daerah yang didukung oleh aparatur yang makin profesional dalam bidangnya. Dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah prinsip-prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta keterpaduan senantiasa dikembangkan di antara aparatur. Sehingga upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan adalah terdiri dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Bupati Kepala Daerah selaku unsur eksekutif dibantu oleh unsur staf pelayanan, perencanaan dan pengawasan, yaitu Sekretariat Wilayah Daerah Tingkat II, Bappeda Tingkat II dan Inspektorat Wilayah Kabupaten, dan unsur pelaksana yang terdiri dari Dinas-dinas Daerah, BUMD dan Instansi vertikal, Departemen Dalam Negeri. Sedang disisi lain DPRD Tingkat II yang bergerak dibidang legeslatif

menjalankan tugasnya dengan dibantu unsur staf yaitu Sekretariat DPRD Tingkat II.

Dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab maka Organisasi Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Lamongan telah ditetapkan menganut Pola Maksimal yaitu dengan 3 (tiga) Asisten Sekwilda dan 14 (empat belas) bagian.

Hasil-hasil yang telah dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1994/1995 antara lain sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah
 - a. Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Otonomi di Daerah.
 - b. Pengembangan Pemerintahan/Lingkungan Kota, meliputi :
 - Penetapan batas wilayah kota;
 - Pengadaan sarana fasilitas kota;
 - Penertiban operasional tata ruang.
 - c. Penyempurnaan Aparatur Pemerintah Daerah.
 - d. Pengendalian, Pembinaan dan Evaluasi Sumber Pendapatan Daerah.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum

a. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Penyempurnaan data kependudukan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977. Penyuluhan registrasi penduduk dan penyempurnaan sistem administrasi kependudukan sebagaimana Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 259 Tahun 1993 dan Inmendagri Nomor 1 Tahun 1977 dilaksanakan di Kecamatan dan Desa/Kelurahan. Selama tahun 1994/1995 sebanyak 19 kali, yang antara lain :

- Pembinaan di Tingkat Pembantu Bupati sebanyak 12 kali dengan dihadiri oleh Camat, Kepala Desa, Kepala Urusan Pemerintahan dan Sekretaris Desa.
- Pembinaan terhadap Kepala Urusan Pemerintahan sebanyak 6 kali.
- Pembinaan terhadap Sekretaris Wilayah Kecamatan sebanyak 1 kali.

Penertiban pemilikan KTP dan Kartu Keluarga terus ditingkatkan, dalam tahun 1994/1995 telah dikeluarkan KTP sebanyak 39.366 lembar dan Kartu Keluarga sebanyak 588 lembar.

b. Pengembangan Wilayah

Sebagai rangkaian dari usulan Peningkatan Status Perwakilan Kecamatan menjadi Kecamatan Difinitif untuk 2 (dua) Perwakilan Kecamatan Maduran dan Sarirejo, untuk tahun

1994/1995 sampai dengan saat ini masih menunggu proses persetujuan dari Menteri Dalam Negeri.

c. Ketentraman dan Ketertiban

Upaya pembinaan ketentraman dan pembinaan ketertiban mencakup operasi penertiban terhadap WTS liar, penertiban becak dan pedagang Kaki lima.

d. Peningkatan Prasarana Fisik Pamong Praja

Dalam tahun anggaran 1994/1995 telah dialokasikan dana stimulan sebesar 15 juta rupiah, dari APBD Tingkat II yang dipergunakan untuk pembangunan Kantor dan Pendopo Kecamatan Sukorame, Pucuk, serta Rumah Dinas Camat Kembangbahu dan telah mampu mendorong partisipasi swadaya masyarakat setempat sejumlah masing-masing untuk Kecamatan Sukorame sebesar Rp. 20 juta rupiah, Kecamatan Kembangbahu sebesar 15 juta 300 ribu rupiah, Kecamatan Pucuk sebesar 34 juta rupiah.

3. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa ditempuh melalui beberapa kegiatan yaitu :

- a. Peningkatan peranan dan fungsi Kepala Desa/Kelurahan;
- b. Peningkatan peranan dan fungsi LKMD dan LMD;
- c. Peningkatan mutu Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui penilaian Kepala Desa berprestasi dan penataran. Dari hasil penilaian terhadap Kepala Desa berprestasi tahun 1994

Kepala Desa Tambakrigadung Kecamatan Tikung telah terpilih sebagai pemenang III di Tingkat I Jawa Timur.

- d. Peningkatan sumber-sumber pendapatan dan kekayaan Desa, serta kesejahteraan aparaturnya.
- e. Peningkatan peranan dan fungsi instansi terkait dalam pembinaan pemerintahan Desa/Kelurahan.
- f. Pembinaan administrasi Desa/Kelurahan
- g. Sebagai terobosan telah dilakukan secara rutin pembinaan terhadap Desa/Kelurahan Percontohan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979, yang diharapkan mempunyai dampak positif terhadap Desa/Kelurahan sekitarnya.

Dewasa ini dari semua desa sebagian terbesar telah memiliki tanah kas desa. Disamping itu, mekanisme dan masa jabatan Kepala Desa telah berjalan sesuai dengan ketentuan.

Partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan cukup tinggi. Dalam tahun 1994/1995 jumlah Bantuan Pembangunan Desa sebesar 2 milyar 850 juta rupiah dan dana swadaya masyarakat untuk mendukung Proyek Bantuan Pembangunan Desa tercatat sebesar 1 milyar 663 juta 664 ribu rupiah atau lebih kurang 53,3 persen dari Bantuan Pembangunan Desa.

Hasil perhitungan Tingkat Perkembangan Desa dalam tahun 1994/1995 menunjukkan kondisi yang menggembirakan. Perinciannya adalah sebagai berikut :

- a. Desa Swasembada Mantap I : - desa
- b. Desa Swasembada Mantap II : 26 desa atau 6 persen
- c. Desa Swasembada Mantap III : 449 desa/kelurahan atau
94 persen

Secara kuantitatif pencapaian desa Swasembada Mantap III pada tahun 1994/1995 naik sebanyak 33 desa dari tahun sebelumnya.

Untuk memacu perkembangan desa-desa yang tingkat pendapatan masyarakatnya masih relatif rendah agar lebih mantap, maka telah diterbitkan instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 24 tahun 1992, dan program khusus Pemerintah Daerah Tingkat II Lamongan berupa Proyek Ronggohadi yang telah dimulai sejak tahun 1991/1992.

Hal tersebut sekaligus merupakan upaya untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mengentas kemiskinan di pedesaan.

4. Pembinaan Sosial Politik

Sasaran program bidang sosial politik tahun 1994/1995 adalah penataan kondisi infra struktur dan supra struktur politik yang mantap, sehingga tercipta stabilitas politik yang dinamis dan terkendali.

kota besar terjadi gejolak dari para mahasiswa dan kaum buruh, diantaranya masalah pemberian upah minimum namun suhu politik di Kabupaten Lamongan masih tetap terkendali dalam batas wajar dan tidak merupakan gangguan stabilitas politik daerah.

Dalam memasuki Pelita VI dinamika masyarakat makin berkembang maka kegiatan penerangan selain berupa peningkatan kegiatan tahun-tahun sebelumnya juga berupa peningkatan komunikasi terhadap sasaran khalayak khusus, seperti generasi muda dan kaum wanita baik pedesaan maupun di perkotaan.

Kaitan dengan upaya peningkatan dan pengembangan kelompok-kelompok informasi dan komunikasi sosial secara kuantitas telah terbentuk Kelompen Cahir 473 kelompok yang sebagian besar telah mampu melaksanakan fungsinya.

Masalah tanah tetap merupakan masalah yang mudah menimbulkan kerawanan. Dalam pada itu, era globalisasi dan keterbukaan serta demokratisasi menyebabkan kesadaran politik rakyat makin meningkat. Hal-hal tersebut harus diantisipasi agar implementasi dari azas demokrasi tidak mengganggu stabilitas. Peranan DPRD sebagai penampung dan penyalur aspirasi rakyat sangat penting. Partisipasi rakyat dalam politik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pendidikan. Sehingga kemampuan

sangat penting. Partisipasi rakyat dalam politik terus meningkat sejalan dengan meningkatnya pendidikan. Sehingga kemampuan anggota DPRD perlu terus ditingkatkan termasuk meningkatkan kearifan dalam memahami aspirasi rakyat yang terus berkembang secara dinamis.

5. Pemasarakatan dan Pembudayaan P-4

Program pemasarakatan dan pembudayaan P-4 dalam tahun anggaran 1994/1995 telah menunjukkan hasil yang mengembirakan. sehingga seluruh jangkauan pemasarakatan P-4 telah mencapai 99,78 persen dari penduduk usia dewasa sebanyak 779.398 orang.

Jumlah ini tidak termasuk penataran P-4 Terpadu bagi siswa SMTP/SMTA sebanyak 31.654 siswa.

Secara kuantitatif pelaksanaan pemasarakatan P-4 mengalami peningkatan yang ditandai oleh :

- a. Tumbuhnya inovasi baru dalam membudayakan P-4 di lingkungan Pemerintahan Daerah.
- b. Semakin maraknya aktivitas seni musik vokal tradisional yang bernafaskan P-4 dan Festival seni musik vokal tradisional.

6. Bidang Pertanahan

Masalah pertanahan merupakan salah satu sumber kerawanan sosial. Karena itu, upaya mencapai Catur Tertib Pertanahan perlu mendapat perhatian serius. Kegiatan pembangunan bidang pertanahan yang dilaksanakan dalam tahun anggaran 1994/1995 mencakup :

- a. Peningkatan penataan pertanahan, meliputi : PRONA, pengaturan dan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, penertiban dan peningkatan penguasaan tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, penataan pertanahan, konsolidasi tanah perkotaan.
- b. Peningkatan prasarana pensertifikatan tanah, meliputi : pembuatan peta/gambar situasi tanah desa, perbaikan peta situasi tanah desa, pembuatan data produksi sertifikat.

Seperti kita ketahui bersama, bahwa kebutuhan lahan untuk keperluan pembangunan semakin lama semakin meningkat. Untuk itu dalam rangka penyerasian tata guna tanah, tata air dan sumber daya alam lainnya, diperlukan pengaturan tata ruang sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang.

Hal ini dilihat dari hasil-hasil yang telah dicapai khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana perencanaan Tata Ruang untuk pelaksanaan pembangunan selama tahun anggaran 1994/1995. Adapun hasil-hasil penyusunan tata ruang dalam tahun 1994/1995 tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota (RTRK/RDTRK) untuk Ibukota Kecamatan Lamongan, Ibukota Kecamatan Ngimbang, dan Ibukota Kecamatan Karanggeneng.
- b. Menyusun profil Sentra Industri Kecil, kerajinan konveksi desa Rayunggumuk Kecamatan Glagah.

7. Bidang Hukum dan Kehakiman

Pelaksanaan pemerintahan yang tertib dan berwibawa menuntut tegaknya hukum dan peraturan perundang-undangan di tengah-tengah masyarakat.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat sangat diperlukan dalam proses pembangunan masyarakat yang semakin maju.

Kegiatan bidang hukum yang telah dicapai selama 1994/1995 antara lain :

- a. Penerangan/penyuluhan hukum yang mencakup penyuluhan hukum yang dilakukan secara koordinatif melalui wadah

Pembantu Kelompok Koordinasi Penyuluhan Hukum, dan kegiatan Kadarkum serta Bimbingan Teknis pemantapan produk hukum telah meningkatkan kesadaran hak dan kewajibannya sehingga meningkatkan pula peran serta masyarakat dalam pembangunan, seperti ketaatan pembayaran pajak dan retribusi dan lain-lain sesuai ketentuan.

- b. Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten sebanyak 4 buah, 549 Keputusan Bupati, 78 Surat Keputusan dan 24 Instruksi Bupati.
- c. Penelitian dan Pengesahan Keputusan Desa se Kabupaten Lamongan sebanyak 605 buah.
- d. Penerbitan buku Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.

Sementara itu, di bidang Kehakiman telah dilaksanakan berbagai kegiatan meliputi :

- a. Pembinaan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan;
- c. Penyuluhan Hukum;
- d. Pendidikan dan Latihan.

8. Bidang Pengawasan Umum

Dalam rangka mencapai Tujuan Nasional diperlukan adanya Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah, yang bermental baik, jujur, bersih, berwibawa serta sadar akan tanggungjawabnya dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan hingga akhir tahun 1994/1995 sebanyak 2.959 orang, meliputi golongan I sebanyak 449 orang, golongan II sebanyak 1.953 orang, golongan III sebanyak 508 orang dan golongan IV sebanyak 19 orang.

Untuk menciptakan aparatur pemerintah yang bersih dan berwibawa, maka pengawasan memegang peranan yang penting. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara fungsional oleh Inspektorat Wilayah Kabupaten. Program pemeriksaan berpedoman pada Keputusan Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1992.

Adapun kegiatan pengawasan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Program pengawasan fungsional mencakup 38 buah obyek pemeriksaan dan realisasinya mencapai 678 buah temuan dan kesemuanya sudah ditindaklanjuti (100 persen).
- b. Pemeriksaan Khusus ;
 - Berdasarkan pengaduan masyarakat langsung Kepada Bupati sebanyak 95 surat;
 - Pengaduan pelimpahan dari Wakil Presiden (Tromol Pos 5000) sebanyak 13 kasus;
 - Pengaduan pelimpahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur sebanyak 6 kasus.

Dari 124 kasus berupa surat pengaduan tersebut telah ditindak lanjuti secara keseluruhan dan dijumpai adanya penyalahgunaan wewenang yang telah dilakukan oleh 5 orang aparat, tindakan indisipliner oleh 6 orang Kepala Desa, dan dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil 2 orang.

Disamping pengawasan fungsional terus ditingkatkan, pengawasan melekat (Waskat) yang dilakukan oleh masing-masing Pimpinan Instansi/Lembaga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tetap dilakukan secara konsisten sebagai tindakan preventif.

V. TINJAUAN UMUM HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 1994/1995

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Dalam proses pembangunan selalu terdapat perubahan, dinamika dan perkembangan menuju tahapan yang lebih baik. Pembangunan yang kita laksanakan selama tahun 1994/1995 telah menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup positif. Secara keseluruhan selama Tahun Pertama PELITA VI pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan menunjukkan kecepatan yang cukup tinggi rata-rata sebesar 7 persen pertahun.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan dalam tahun 1993/1994 berdasarkan perhitungan PDRB mencapai 7,37 persen yang berarti melebihi target rata-rata yang direncanakan dalam PELITA VI sebesar 7 persen per tahun.

Dalam pada itu, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lamongan pada tahun 1993 berdasarkan atas harga berlaku tercatat 923 milyar 149 juta 835 ribu 93 rupiah, sedangkan tahun sebelumnya tercatat 811 milyar 539 juta 679 ribu 66 rupiah, atau naik 13,75 persen.

Selanjutnya, mengenai besarnya pendapatan per kapita penduduk Kabupaten Lamongan pada tahun 1993 berdasarkan atas harga berlaku tercatat sebesar 766 ribu 490 rupiah sedangkan tahun sebelumnya sebesar 681 ribu 300 rupiah, atau naik sebesar 12,50 persen.

Terjadinya pergeseran peran sektor pertanian ke sektor industri sesuai dengan arah kebijaksanaan pembangunan relatif masih kecil, sehingga sampai saat ini peranan sektor pertanian dalam perekonomian kita masih cukup dominan dengan kontribusinya sebesar 57,05 persen, urutan berikutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 16,04 persen diikuti sektor pemerintahan sebesar 7,18 persen, sektor industri pengolahan 5,05 persen dan sektor bangunan sebesar 4,16 persen terhadap PDRB.

Peranan sektor swasta dalam penyediaan investasi pembangunan masih relatif kecil, sehingga diperlukan berbagai upaya untuk menarik investasi swasta terus digalakkan melalui promosi investasi, pemasaran, misi dagang, seminar dan sebagainya.

Sementara itu, nilai ekspor komoditi non migas menunjukkan peningkatan pada tahun 1993 sebesar 5,11 persen. Apabila pada tahun 1993 nilai ekspor non migas Kabupaten Lamongan tercatat 2 juta 379 ribu 170 US Dolar, maka dalam tahun 1994 sebesar 2 juta 500 ribu 874,2 US Dolar.

Dari sisi volume juga meningkat, yakni sebesar 9,80 persen, apabila tahun 1993 volume ekspor 413 ribu 720 ton dan 1994 tercatat 454 ribu 281 ton dengan negara tujuan eksport telah mencapai 9 negara dengan jumlah eksportir 17 orang.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Sektor pertanian di Kabupaten Lamongan masih merupakan andalan, baik dalam kaitan dengan penyediaan kebutuhan pangan, bahan baku industri, pengembangan ekspor non migas dan terlebih lagi sebagai pemasok utama stock pangan nasional. Dalam rangka pemantapan Swasembada pangan, khususnya beras, maka pembangunan sektor pertanian menempuh 4 usaha pokok, yaitu : Diversifikasi, Intensifikasi, Ekstensifikasi dan Rehabilitasi.

Pada sub sektor pertanian tanaman pangan dalam tahun 1994/1995, sebagian besar rata-rata hasilnya mengalami penurunan bila dibandingkan produksi tahun 1993/1994 akibat musim kemarau yang berkepanjangan serta berkurangnya areal panen karena adanya bencana banjir.

Untuk komoditi padi realisasinya mencapai 670 juta 999 ribu ton atau mengalami penurunan sebesar 3 ribu 189 ton atau 0,47 persen, karena berkurangnya areal panen seluas 1 ribu 162 Ha.

Jagung mencapai 124 ribu 851 ton atau turun sebesar 14 ribu 731 ton atau 0,55 persen, dibanding tahun lalu, karena berkurangnya areal panen seluas 3 ribu 931 Hektar.

Kedelei produksinya 36 ribu 989 ton, mengalami penurunan 10 ribu 588 ton, atau 22,25 persen karena areal panen menurun seluas 2 ribu 470 Hektar.

Ubi Kayu produksinya 41 ribu 709 ton, mengalami penurunan 18 ribu 765 ton, dengan areal panen menurun sebesar 1.154 Hektar.

Kacang Tanah produksinya 5 ribu 801 ton, mengalami penurunan 5.173 ton atau 47,14 persen, karena penurunan areal panen seluas 2 ribu 149 Hektar.

Keberhasilan pembangunan sub sektor perkebunan ditandai oleh adanya peningkatan luas areal, jumlah produksi, peranannya dalam menyumbang PDRB dan nilai ekspor hasil perkebunan. Luas areal tebu tahun 1994/1995 1 ribu 415,7 Hektar, naik 8,66 persen dibanding tahun 1993/1994;

Tembakau luas areal sebesar 6 ribu 592 Hektar, naik 28,21 persen;

Serat Karung luas areal 1 ribu 129,7 Hektar turun 6,92 persen;

Sedangkan luas areal tanaman tahunan seperti Kelapa, Jambu Mete, Cabe Jamu, Siwalan dan Kapuk Randu pada tahun 1994/1995 tercatat seluas 7 ribu 566 Hektar, naik 0,4 persen dibanding tahun 1993/1994.

Tanaman perkebunan yang arealnya mengalami penurunan adalah Kapas yaitu sebesar 195,45 Hektar, atau dengan pencapaian tanam baru 15 persen, disebabkan iklim yang tidak mendukung pada saat penanaman (kemarau panjang) juga adanya alih kelola program dari PTP XXVI kepada Pabrik Rokok Sukun Kudus.

Produksi perikanan pada tahun 1994/1995 tercatat sebesar 57 ribu 763,83 ton terdiri atas : hasil tangkapan di laut sebesar 30 ribu 515 ton, hasil tangkapan di perairan umum sebanyak 1 ribu 760 ton dan hasil budidaya sebesar 25 ribu 488,57 ton. Dibandingkan produksi tahun 1993 sebanyak 53 ribu 921,4 ton maka, produksi perikanan tahun 1994 naik sebesar 7,1 persen.

Penghasilan rata-rata kelompok nelayan masih tergolong rendah, namun dalam tahun 1994 kenaikannya cukup tinggi, mencapai 1 juta 063 ribu 860 rupiah, naik 21 persen dari tahun 1993. Sedangkan penghasilan petani ikan pada tahun 1994 tercatat 1 juta 528 ribu 106 rupiah, mengalami penurunan 4,4 persen dari tahun 1993.

Dengan kenaikan produksi ikan 7,1 persen tahun 1994 telah berpengaruh pada tingkat konsumsi makan ikan pada tahun 1994 menunjukkan kenaikan 4,7 persen, dibanding tahun 1993 yaitu dari 14,54 Kg perkapita pertahun menjadi 15,23 Kg perkapita pertahun.

Pembangunan sub sektor peternakan menunjukkan hasil yang cukup positif. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan produksi daging sebesar 3,54 persen, namun demikian untuk telur dan susu mengalami penurunan telur turun 17,82 persen dan susu turun sebesar 29,62 persen. Produksi daging tahun 1994 tercatat 4 ribu 318,6 ton, sedangkan tahun 1993 sebesar 4 ribu 226,27 ton. Produksi telur dari 1 ribu 033,46 ton pada tahun 1994 sedangkan pada tahun 1993 sebesar 1 ribu 257,65 ton. Sedangkan produksi susu mencapai 19 ton pada tahun 1994 dan pada tahun 1993 tercatat 27 ton.

Hasil produksi kehutanan pada tahun 1994 dari segi volume kondisinya bervariasi. Untuk produksi kayu jati volumenya turun 12,4 persen, sebesar 2 ribu 567 Meter kubik pada tahun 1994 dibanding tahun 1993 sebesar 2 ribu 886 Meter kubik. Untuk produk kayu rimba tahun 1994 produksinya sebesar 984 ton.

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan upaya-upaya yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Penanaman Polowijo dengan sistem tumpangsari selama kurun waktu 2 (dua) tahun;
2. Program INSUS Tumpangsari dengan mendapatkan bantuan pengadaan Saprodi (bibit unggul Polowijo, pupuk dan obat-obatan).

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Pembangunan sektor pertanian yang berhasil tidak mungkin terlepas dari kondisi prasarana pengairan dan sistem irigasi yang memadai. Kabupaten Lamongan yang mempunyai luas wilayah \pm 181.280.320 Hektar, dari luas tersebut terdapat 93.590 Hektar sawah yang terdiri dari sawah pengairan umum dan non pengairan umum, serta tadah hujan yang airnya memanfaatkan air waduk, rawa, embung, kali dan air hujan.

Sedangkan sawah pengairan umum yang memiliki luas 47.915 Hektar terdiri dari :

- Sawah irigasi teknis : 14.821 Hektar
- Sawah irigasi belum teknis : 11.372 Hektar
- Sawah irigasi sederhana : 21.722 Hektar

Dalam pelaksanaan pembinaan air ini sebenarnya merupakan tugas yang cukup berat, dikarenakan luas wilayah dan kompleksnya permasalahan atas air dibanding dengan terbatasnya tenaga yang ada dilapangan.

Untuk meningkatkan ketersediaan air baku maka, pada tahun anggaran 1994/1995 telah ada Crash Program Normalisasi Waduk melalui Proyek Air Baku Proyek Bengawan Solo sebanyak 11 waduk pengairan dan 4 waduk desa dan Crash Program Proyek PID melalui

Proyek Irigasi Jawa Timur teralokasi 2.216 Hektar dengan 22 buah jaringan irigasi dengan besar dana 997 juta 200 ribu rupiah.

Program pembangunan sektor Pengairan disamping membangun jaringan baru juga mencakup program operasi dan pemeliharaan jaringan. Jenis Program pembangunan pengairan dan hasil-hasilnya dalam tahun 1994/1995 adalah seperti berikut :

- 1. Program operasi dan pemeliharaan yang meliputi areal baku seluas 19 ribu 938 hektar. Program ini pelaksanaannya tergantung pada realisasi rehabilitasi dan pemeliharaan berat. Jaringan yang telah memperoleh program operasi dan pemeliharaan yang nantinya akan diterapkan Iuran Pelayanan Irigasi (IPAIR).**
- 2. Program penyelamatan hutan, tanah dan air guna menangani kerusakan akibat banjir.**

Dalam tahun 1994/1995 luas lahan kritis tercatat 20 ribu Ha. Dari areal tersebut lahan yang telah direhabilitasi seluas 1 ribu 500 Ha, sehingga areal lahan kritis yang tersisa seluas 18 ribu 500 Ha. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam rangka rehabilitasi dan konservasi tanah meliputi :

1. Pembuatan Kebun Bibit Desa (KBD) 5 unit seluas 5 Hektar;
2. Pembuatan unit percontohan usaha pelestarian sumber alam (UP-UPSA) seluas 40,92 Hektar;
3. Pemeliharaan unit percontohan usaha pelestarian sumber alam (UP-UPSA) 5 unit seluas 50,35 Ha;
4. Pembuatan Dam Penahan sebanyak 3 unit;
5. Pembuatan Kebun Rakyat sebanyak 4 unit seluas 160 Ha;
6. Rehabilitasi teras 3 unit seluas 100 Ha;
7. Pembuatan Pengendalian Jurang Kecil 4 unit;

Prasarana jalan mempunyai arti yang sangat strategis dalam menunjang keberhasilan pembangunan sektor-sektor lain, utamanya perekonomian.

Program pembangunan jalan terdiri atas program rehabilitasi dan penunjang jalan dan jembatan. Sasaran program adalah meningkatkan kondisi jalan dan jembatan menjadi mantap agar semua ruas jalan dapat berfungsi secara optimal.

Panjang jalan Negara/Nasional di Kabupaten Lamongan adalah 34,263 Km, Jalan Propinsi sepanjang 91,602 Km sedangkan jalan Kabupaten 429,4 Km sehingga panjang jalan total 555,265 Km.

Pada tahun 1994 untuk jalan negara/nasional kondisi mantap 98 persen, dan jalan propinsi kondisi mantap 74,33 persen dan sisanya 25,67 persen kondisi sedang. Sedangkan jalan kabupaten kondisi

mantap 40 persen, kondisi sedang 27 persen, kondisi buruk 33 persen. Sebagian jalan kabupaten yang memiliki kondisi buruk dikarenakan terkena bencana banjir.

Dalam rangka pemanfaatan jaringan jalan secara optimal untuk kelancaran arus penumpang, maka telah diatur sistem jaringan trayek antar kota dalam dan antar kabupaten untuk jaringan jalan nasional/negara dan propinsi. Sedangkan untuk jaringan jalan Kabupaten telah ditetapkan pula sistem jaringan trayek angkutan penumpang umum perkotaan dan pedesaan. Dewasa ini hampir semua kota kecamatan telah dilayani oleh angkutan pedesaan, sehingga mobilitas penduduk semakin tinggi.

Program pembangunan sub sektor Perhubungan Darat mencakup pengadaan fasilitas dan pengawasan lalu lintas, prasarana angkutan kereta api dan sarana kereta api.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Pembangunan perkoperasian di Kabupaten Lamongan selama tahun 1994/1995 dari segi kelembagaan maupun keanggotaan mengalami peningkatan. Sementara ini jumlah lembaga KUD dan Non KUD sebanyak 130 buah, sementara itu tahun 1993 hanya 127 buah atau bertambah 2 persen. Jumlah anggota yang semula 139 ribu 749

orang telah meningkat menjadi 143 ribu 304 orang atau bertambah 3 ribu 555 orang.

Begitu pula simpanannya dari 2 milyar 138 juta 715 ribu 277 rupiah menjadi 3 milyar 231 juta 924 ribu 250 rupiah atau naik 51,1 persen.

Dalam rangka menggairahkan masyarakat untuk menumbuhkan dan mengembangkan perkoperasian sebagai perwujudan tekad Kabupaten Lamongan sebagai Bumi Koperasi serta mengingat peranan Koperasi sebagai unit ekonomi merupakan "Soko Guru" ekonomi rakyat yang sekaligus merupakan wahana pemerataan kesempatan berusaha maka perkembangan perkoperasian harus terus di pacu selaras dengan perkembangan dan kemajuan di bidang ekonomi.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Potensi sumber daya manusia yang besar di Kabupaten Lamongan merupakan modal dasar pembangunan yang seandainya dapat didayagunakan secara efisien di dalam suatu sistem produksi. Disisi lain, jumlah tenaga kerja yang besar dapat menimbulkan masalah yang rumit jika karakteristik lapangan kerja yang ada kurang memungkinkan mendayagunakan mereka secara optimal, bahkan dapat merupakan beban pembangunan, sekaligus menimbulkan permasalahan yang memerlukan penanganan secara serius. Perkembangan ketenaga kerjaan di Kabupaten Lamongan tercatat

pada tahun 1994/1995 angkatan kerja sebanyak 602,667 orang dengan angkatan kerja yang tertampung sebanyak 583,116 orang.

Sedangkan jumlah pencari kerja yang terdaftar pada tahun 1994/1995 sebesar 6,469 orang. Sedangkan jumlah penempatan kerja yang terdaftar pada tahun 1994/1995 hanya 556 orang atau 8,5 persen, maka terlihat masih adanya ketimpangan yang belum seimbang antara ledakan pencari kerja yang terus meningkat dan kesempatan kerja yang serba terbatas.

Rendahnya pendayagunaan tenaga kerja tersebut sangat dipengaruhi oleh tiga faktor penting, struktur angkatan kerja menurut pendidikan, struktur kesempatan kerja menurut pendidikan dan kesesuaian tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan kerja.

Oleh karena itu kebijaksanaan pemerintah yang diambil dalam jangka panjang diupayakan program-program pendidikan yang memiliki pertautan yang jelas dengan kebutuhan pasar, sedangkan kebijaksanaan yang ditempuh dalam jangka pendek berkaitan dengan pemecahan ledakan pencari kerja dan produktifitas tenaga kerja pada tahun 1994/1995 mencakup :

1. Perluasan lapangan kerja dan kesempatan kerja;
2. peningkatan pelatihan dan produktivitas kerja;
3. peningkatan perlindungan tenaga kerja termasuk pengupahan.

Dari kebijaksanaan tersebut, maka langkah-langkah yang telah diambil meliputi :

1. Mendayagunakan tenaga penganggur dan setengah penganggur, melalui beberapa program antara lain AKAL, AKAD dan AKAN, pendayagunaan tenaga kerja sukarela terdidik. Usaha Mandiri Sektor Informasi (UMSI), pelatihan ketrampilan.
2. Perencanaan tenaga kerja melalui program pelatihan teknisi perencanaan, penyusunan Sistem Informasi Pasar Kerja dan Perencanaan Tenaga Kerja (SIPPTEK).
3. Perlindungan tenaga kerja : penerapan norma kerja, pembentukan Panitia Pembina K3, Hubungan Industrial Pancasila, pembentukan SPSI, Lembaga Kerjasama Bipartie dan Tripartie, Koperasi Karyawan, Sistem Pengupahan.

Meskipun pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan cukup berhasil dan menonjol, selama ini masih terdapat warga yang kehidupannya diambang garis kemiskinan.

Untuk itu masalah upaya pengentasan kemiskinan telah mendapat perhatian serius dari Kabupaten Lamongan sejak awal PELITA V, jauh sebelum diumumkannya Peta Kemiskinan oleh BAPPENAS pada awal April 1993. Wujud dari perhatian yang tinggi terhadap

upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan mengarahkan program-program pembangunan ke pedesaan, daerah minus/kritis dan daerah yang sumber daya alamnya sangat terbatas, diantaranya adalah dengan proyek Ronggohadi yang merupakan program terobosan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dalam upaya mengangkat status desa yang paling tertinggal dalam suatu kecamatan yang secara tidak langsung untuk mengangkat masyarakatnya yang masih kurang beruntung.

Disamping itu terdapat program-program khusus seperti : Program Pengembangan Wilayah Terpadu, Pengembangan Kecamatan Terpadu, Pengembangan Kecamatan Rawan, program bantuan Inpres Pembangunan Desa dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan rakyat pedesaan. Pengentasan kemiskinan merupakan kegiatan yang mencakup lintas sektoral yang menyangkut berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu harus ditangani secara terpadu. Konsep yang tepat dan telah dilaksanakan ialah melalui program Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP) pada tingkat kecamatan dengan sasaran meningkatkan desa swasembada.

Berkaitan dengan upaya mengentas kemiskinan telah diterbitkan Instruksi Gubernur Nomor 6, Tahun 1993 agar penanganan proyek-proyek lintas sektoral ditangani secara terpadu supaya lebih berhasil guna dan berdaya guna, serta Model Keluarga Mandiri dan

operasionalnya telah dilakukan pendataan dan pemetaan pada 66 desa tertinggal di 15 Kecamatan yang saat ini berkembang menjadi 70 Desa, adapun tambahan 4 (empat) desa tersebut masing-masing adalah desa Jabung, Dateng, Tamanprijek, dan Karangtawar, Kecamatan Laren.

Kalau pada tahun 1990 tercatat bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Lamongan 101 ribu orang, maka pada tahun 1994/1995 berdasarkan hasil pendataan dari petugas pendata Tingkat Desa yang telah terlatih, keluarga miskin di 66 Desa tertinggal tersebut tinggal 99.070 jiwa pada 7.615 Kepala Keluarga dan yang memperoleh bantuan sebanyak 32.242 jiwa, sedangkan sisanya sebanyak 660.828 orang akan memperoleh bantuan dari hasil pengguliran dan bantuan IDT tahun yang akan datang.

Disamping itu seperti diketahui, bahwa saat ini semua desa telah berstatus Desa swasembada dan bahkan swasembada mantap I sudah tidak ada, dan Desa Swasembada Mantap II sebanyak 26 desa sedangkan Swasembada mantap III sebanyak 449 desa/kelurahan.

Pembangunan sektor Pendidikan memegang peranan penting dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil pembangunan sektor pendidikan adalah sebagai berikut :

1. Jumlah lembaga Taman Kanak-Kanak sebanyak 752 sekolah yang tersebar di 475 desa/kelurahan.

2. Angka partisipasi SD, anak usia 7-12 tahun telah mencapai 99,64 persen.
3. Angka transisi SD ke SLTP mencapai 84,23 persen
4. Angka transisi dari SLTP ke SLTA mencapai 73,48 persen.
5. Untuk menjaga kelangsungan peserta Kejar Paket A dan memperluas kesempatan belajar dalam rangka wajib belajar SLTP atau Rinwajar 9 tahun, maka dirintis program Paket B.
6. Pelaksanaan KKN mahasiswa Perguruan Tinggi dalam rangka pengabdian masyarakat diarahkan pada pembangunan pedesaan dan pembinaan desa tertentu sebagai obyek studi.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Untuk mewujudkan fasilitas perumahan dan pemukiman yang layak, aman, sehat dan serasi, maka dalam tahun 1994/1995 telah dilaksanakan program-program berikut :

1. Program Pembangunan Kota meliputi :
 - Rencana Umum Tata Ruang Kota dengan kedalaman Rencana Detail Tata Ruang Kota
 - Program P3KT.
2. Program Penyediaan air bersih, mencakup :
 - Pembangunan sarana air bersih perkotaan dan perdesaan.

3. Program Penyehatan Lingkungan Pemukiman, meliputi :
 - Pengadaan prasarana drainase;
 - Pengadaan prasarana persampahan dan normalisasi saluran;
 - Penanganan air limbah.

4. Program Perumahan Rakyat, mencakup :
 - Perbaikan lingkungan dan Pemugaran Rumah;
 - Perbaikan kampung perkotaan;
 - Perbaikan Lingkungan Pemukiman Nelayan.

Sementara itu, oleh Perum PERUMNAS dalam tahun 1994/1995 telah dibangun kembali RSS kurang lebih 475 unit, dengan lokasi di Perumnas Made.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Pembangunan kesehatan merupakan aspek penting bagi kesejahteraan masyarakat. Hasil pembangunan bidang kesehatan menunjukkan peningkatan yang cukup berarti. Jumlah PUSKESMAS pada tahun 1994/1995 sebanyak 31 buah, PUSKESMAS Pembantu meningkat menjadi 105 buah. PUSKESMAS Keliling Darat 29 buah, PUSKESMAS Keliling Sungai 1 buah. Pondok Bersalin dari 107 buah menjadi 194 buah. sedangkan unit Posyandu telah mencapai 1

ribu 740 buah. Dalam tahun 1994/1995 untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di PUSKESMAS telah ditempatkan 56 dokter umum, terdiri dari 27 dokter PTT, dan 30 dokter PNS, 19 dokter gigi, terdiri dari 13 orang dokter gigi PNS dan 6 orang dokter gigi PTT, 2 orang lulusan SKM, 9 lulusan APK, 7 lulusan AKPER, dan didukung 753 paramedis. Pada saat ini jumlah tempat tidur di rumah sakit tercatat 100 buah, dengan rata-rata pemakaian tempat tidur 60,38 persen.

Upaya peningkatan gizi masyarakat oleh Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD) mengingat masalahnya sangat kompleks, pelaksanaannya dilakukan secara lintas sektoral dan terpadu melalui kelompok-kelompok kerja (POKJA). Operasional di lapangan dilaksanakan lewat unit pelayanan kesehatan terdepan seperti Posyandu.

Keberhasilan program KB di Kabupaten Lamongan memberikan andil yang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hasil-hasil yang dicapai di bidang KB Tahun 1994/1995 antara lain seperti berikut :

1. Jumlah peserta KB aktif Tahun 1994/1995 mencapai 175 ribu 030 orang naik 2 persen dari tahun 1993/1994, yakni 3 ribu 856 orang.

2. Jumlah peserta KB Mandiri pada Tahun 1994/1995 mencapai 99 ribu 304 orang atau meningkat 11 persen dibanding tahun 1993/1994.

Peningkatan KB Mandiri ini, merupakan dampak dari keberhasilan pengembangan KB dengan sistem kredit.

Disamping program KB, upaya untuk mengatasi masalah kependudukan ialah melalui program transmigrasi.

Dalam tahun 1994/1995 dari target Kabupaten Lamongan sebanyak 225 Kepala Keluarga berhasil diberangkatkan 258 KK meliputi 893 jiwa. Jumlah ini mencapai 114,67 persen dari target.

Transmigrasi yang diberangkatkan berasal dari daerah sasaran prioritas pengerahan, yakni kawasan padat penduduk, kawasan kritis tandus, kawasan bencana alam, kawasan pengembangan pembangunan, daerah aliran sungai. Keberhasilan tersebut dapat dicapai berkat koordinasi yang mantap dari Dinas/Instansi terkait hingga Tingkat Desa yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat dan aparat desa, disamping itu juga sebagian masyarakat yang akan bertransmigrasi sudah tidak lagi memilih tempat tujuan. Hal yang menggembirakan adalah dari keluarga para transmigrasi yang telah berhasil, sering mengadakan kunjungan dan penyuluhan di desa asalnya sehingga dapat memotivasi, membantu kelancaran dan pensuksesan Program Transmigrasi.

Sedangkan jenis transmigrasi cukup bervariasi yaitu : transmigrasi Umum, transmigrasi Swakarsa PIR, Swakarsa HTI, Transmigrasi Mandiri Swakarsa dan Swakarsa Pengembangan Desa Potensial.

Guna meningkatkan kualitas para transmigran, maka mereka telah dibekali dengan pengetahuan ketrampilan di bidang usaha tani terpadu, kader kesehatan, pertukangan dan peranan wanita.

Sumber daya alam yang ada selain dimanfaatkan untuk pembangunan secara optimal perlu dijaga kelestariannya sesuai dengan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, yaitu pembangunan yang berkelanjutan.

Sementara itu, pemanfaatan sumber daya alam cenderung menimbulkan dampak negatif. Oleh karena itu, pemabangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup mendapat prioritas.

Program dan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan dalam tahun 1994/1995 di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

1. Inventarisasi dan Evaluasi Sumber Alam dan Lingkungan Hidup. Hasilnya berupa Neraca Kependudukan dan Lingkungan Hidup serta Neraca Sumber Daya Alam.
2. Usaha pelestarian sumber daya alam serta upaya rehabilitasi lahan dan konservasi tanah seluas 590,04 Hektar dengan harapan

tersedianya lahan-lahan yang lebih produktif dengan erosi yang sekecil mungkin

3. Program penyelamatan hutan, tanah dan air. Program ini telah berhasil menurunkan lahan kritis sebesar 3 ribu 730 Hektar.
4. Pembinaan daerah pantai berupa penanaman penghijauan pantai dengan tanaman bakau dan api-api.
5. Pengendalian pencemaran lingkungan hidup, berupa kegiatan-kegiatan : pengendalian pencemaran air, program Kali Bersih (PROKASIH), pembangunan MCK, kebersihan kota.

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lamongan dalam tahun 1994/1995 dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan :

1. Pembangunan Daerah Tujuan Wisata;
2. Pengembangan Usaha Industri Pariwisata;
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Jumlah kunjungan wisatawan Nusantara tahun 1994/1995 naik 52,72 persen dibanding tahun 1993/1994 dari 285 ribu 178

orang menjadi 540 ribu 879 orang, peningkatan arus wisatawan ini utamanya dikarenakan setelah dipugar dan diresmikannya Gua Maharani.

Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang realisasi proyek-proyek tahun anggaran 1994/1995 yang dibiayai dari dana rupiah murni sebagai berikut :

- Dana proyek sektoral mencapai 14 milyar 097 juta 227 ribu 300 rupiah.

Sementara itu, untuk proyek-proyek Inpres dalam tahun 1994/1995 dana yang dialokasikan sebesar 9 milyar 691 juta 095 ribu rupiah, dengan realisasi 9 milyar 683 juta 741 ribu rupiah atau 99,9 persen.

Perinciannya adalah sebagai berikut :

1. Inpres Daerah Tingkat II dengan dana 5 Milyar 841 juta 089 ribu realisasinya 5 milyar 838 juta 279 ribu 240 rupiah atau sebesar 99,9 persen, kemajuan fisik 100 persen.
2. Inpres sarana pendidikan dengan alokasi dana 1 milyar 449 juta 086 ribu rupiah, realisasi dana 1 milyar 449 juta 084 ribu 600 rupiah atau 99,99 persen dengan kemajuan fisik 100 persen.

3. Inpres Sarana Kesehatan memperoleh dana 528 juta 311 ribu rupiah, realisasi dana 528 juta 251 ribu 680 rupiah 7 sen atau sama dengan 99,98 persen dan kemajuan fisik 100 persen.
4. Inpres Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dengan alokasi dana 1 milyar 372 juta 865 ribu rupiah, realisasinya 1 milyar 367 juta 861 ribu 500 rupiah atau 99,63 persen, kemajuan fisik 100 persen.
5. Inpres Penghijauan dan Reboisasi mendapat dana 217 juta 618 ribu rupiah, realisasi dana 217 juta 618 ribu rupiah atau 100 persen dan kemajuan fisik 100 persen.
6. Inpres Desa dengan dana 2 milyar 683 juta 875 ribu rupiah terserap 2 milyar 683 juta 875 ribu rupiah atau 100 persen dengan realisasi fisik 100 persen.

Dalam pada itu, proyek-proyek yang dibiayai dengan dana APBD Tingkat I Jawa Timur dengan alokasi dana 253 juta 500 ribu rupiah pelaksanaannya terserap 253 juta 500 ribu rupiah atau 100 persen dengan realisasi fisik 100 persen.

VI. PENUTUP

Saudara Ketua dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan yang saya hormati;

Saya menilai, bahwa berbagai keberhasilan pembangunan di Kabupaten Lamongan sebagaimana telah saya sampaikan di muka, pada dasarnya, merupakan hasil kerjasama, kerja keras dan peran serta seluruh aparat dan rakyat Kabupaten Lamongan.

Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan hati, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak terutama kepada para Anggota Dewan, aparat keamanan dan ketertiban, Instansi Vertikal dan Instansi Daerah Otonom, Lembaga-Lembaga Sosial Politik dan seluruh rakyat Kabupaten Lamongan yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang positif guna keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan.

Saya berharap agar Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah ini dapat dipergunakan sebagai bahan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lamongan tahun anggaran 1994/1995.

Informasi yang lebih rinci dapat dikaji dari buku-buku yang saya sertakan sebagai lampiran tak terpisahkan dari Keterangan Pertanggungjawaban saya ini.

Mengingat bahwa penyampaian Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kepala Daerah Tingkat II kali ini adalah merupakan yang pertama dari masa jabatan saya yang kedua dalam masa bhakti tahun 1994-1999 maka saya ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan saya selama ini, dan selanjutnya mengajak segenap aparatur dan seluruh masyarakat untuk meneruskan dan meningkatkan perjuangan kita dalam pembangunan dengan kerja keras dan kebersamaan.

Akhirnya, atas segala perhatian dari Pimpinan dan segenap Anggota Dewan serta hadirin, saya sampaikan terima kasih.

Wabillahi Taufiq Wal-hidayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Lamongan, 24 Mei 1995

Pih. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II



Pembina Tingkat I

NIP. 010 044 105